BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 201
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
maa dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun
Anggaran 2016, perlu ditetapkan Besaran Uang
Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaga Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1


Pasal 2

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing SKPD.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SKPD yang telah mempertanggungjawabkan UP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui Ganti Uang Persediaan (GU) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU); dan

Pasal 6


Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>SATUAN KERA PERANGKAT DAERAH</th>
<th>UANG PERSEDIAAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dinas Pendidikan</td>
<td>Rp 1,000,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Dinas Kesehatan</td>
<td>Rp 350,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo</td>
<td>Rp 125,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan</td>
<td>Rp 125,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Dinas Pekerjaan Umum</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Dinas Pengairan</td>
<td>Rp 150,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</td>
<td>Rp 400,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Dinas Perhubungan</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Badan Lingkungan Hidup</td>
<td>Rp 100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Dinas Kebersihan dan Pertamanan</td>
<td>Rp 200,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</td>
<td>Rp 200,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</td>
<td>Rp 100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</td>
<td>Rp 150,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Satuan Polisi Pamong Praja</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td>
<td>Rp 60,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Sekretariat Daerah terdiri dari:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana</td>
<td>Rp 50,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b. Bagian Pemerintahan</td>
<td>Rp 100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>c. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-</td>
<td>Rp 100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>undangan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>d. Bagian Perlengkapan</td>
<td>Rp 100,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>e. Bagian Pembangunan</td>
<td>Rp 50,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>f. Bagian Perekonomian</td>
<td>Rp 50,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>g. Bagian Umum dan Keuangan</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>h. Bagian Humas dan Protokol</td>
<td>Rp 120,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>i. Bagian Kesejahteraan Rakyat</td>
<td>Rp 25,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td>Rp 895,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah</td>
<td>Rp 2,000,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Badan Kepegawaian Daerah</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Inspektorat</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Badan Perijinan</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Kantor Ketahanan Pangan</td>
<td>Rp 40,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</td>
<td>Rp 75,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Kantor Arsip dan Perpustakaan</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Dinas Komunikasi dan Informatika</td>
<td>Rp 50,000,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

JUMLAH DIPINDAHKAN Rp 9,020,000,000.00
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</th>
<th>UANG PERSEDIAAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH PINDAHAN</strong></td>
<td><strong>Rp 9,020,000,000.00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Dinas Pertanian</td>
<td>Rp 350,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Dinas Perhutanan dan Perkebunan</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Dinas Peternakan dan Perikanan</td>
<td>Rp 300,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</td>
<td>Rp 200,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Dinas Pendidikan Daerah</td>
<td>Rp 250,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</td>
<td>Rp 125,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Kecamatan Bojonegoro</td>
<td>Rp 80,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Kecamatan Kapas</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Kecamatan Balen</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Kecamatan Sumberrejo</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Kecamatan Kanor</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Kecamatan Baureno</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Kecamatan Sugihwaras</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Kecamatan Kepohbaru</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Kecamatan Kedungadem</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Kecamatan Sukosewu</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Kecamatan Trucuk</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Kecamatan Malo</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Kecamatan Kalitudu</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Kecamatan Dander</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Kecamatan Padangan</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Kecamatan Purwosari</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Kecamatan Kasiman</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Kecamatan Kedewan</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Kecamatan Ngasem</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Kecamatan Ngambon</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Kecamatan Tambakrejo</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Kecamatan Ngroho</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Kecamatan Margomulyo</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Kecamatan Temayang</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Kecamatan Bubulan</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Kecamatan Gondang</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Kecamatan Sekar</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Kecamatan Gayam</td>
<td>Rp 30,000,000.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                | JUMLAH TOTAL                               | Rp 11,435,000,000.00 |

**BUPATI BOJONEGORO,**

**tttd.**

**H. SUYOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. SOFIATI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008